



**GUNTINGAN BERITA**  
**PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**  
**SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN**

Hari : <b>Rabu</b>		Tanggal : <b>27</b>	Bulan : <b>MEI</b>	Tahun : <b>2015</b>
MEDIA :	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	
Halaman :	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,			Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,			

**Kasudin Kelautan, Pertanian dan  
Ketahanan Pangan Jakpus  
Belum Temukan Beras Plastik**

**Lampu Hijau, Jakarta Pusat**

Jelang masuknya bulan Ramadhan, sidak terhadap pasar-pasar penjual sembako di Jakarta Pusat terus digalakkan Sudin Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Jakarta Pusat guna mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan yang dapat merugikan masyarakat.

Selasa (26/5) subuh, sidak terhadap maraknya beras sintesis atau plastik dilakukan di Pasar Gembong, Cempaka Putih. Sejumlah agen dan distributor beras, sembako dan daging di Pasar tersebut pun panik ketika melihat kedatangan petugas.

Sejumlah agen dan distributor yang ada di dalam maupun luar pasar, tak luput dari pemeriksaan. "Operasi kita lakukan karena maraknya ditemukan peredaran beras plastik di beberapa daerah, namun dari hasil sample pemeriksaan fisik beras negatif berbahan plastik. Akan tetapi untuk memastikan kembali, kita lakukan uji lab," terang Kasudin Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Jakarta Pusat, Muhammad Mulyadi di lokasi.

Menurutnya, pemeriksaan beras secara fisik merupakan hal sederhana untuk masyarakat umum mengetahui bahwa beras plastik atau tidak. "Pertama bisa dengan mencium dari baunya, kemudian bisa dengan cara merendam dan membakarnya. Klo beras saat direndam mengambang, bisa dikatakan sintesis," jelasnya. (RKY)

Intruksi / Informasi	Diteruskan / Kepada



**GUNTINGAN BERITA**  
**PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**  
**SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN**

Hari : **Rabu**      Tanggal : **27**      Bulan : **MEI**      Tahun : **2015**

<b>MEDIA</b>	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

**Halaman** : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,  
 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,      **Kolom** : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

## Wali Kota Jakpus Tak Berdaya PMKS Marak Diwilayahnya

### Jakarta, Pelita

Berbagai upaya menekan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terus dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Namun keberadaan PMKS tersebut masih tetap marak di ibu kota. Diprediksi jumlah PMKS akan terus meningkat jelang bulan Ramadhan mendatang. Para PMKS yang didominasi pengamen dan pengemis tidak hanya menjalankannya aksinya di perempatan jalan, namun keberadaan mereka

sering masuk ke sejumlah mini-market dan perumahan warga.

Bahkan Wali Kota Jakpus Mangara Perdede pun dituding tak berdaya mengatasi keberadaan PMKS di wilayahnya. Warga menduga wali kota tak lagi memikirkan keberadaan PMKS, yang semakin marak di wilayahnya. "Sangat mengganggu, suara musiknya juga sangat bising, apalagi kita mau ke taman ini kan mau santai, kalau setiap hari seperti ini warga jadi enggan

untuk ke taman ini," ujar Fardi, warga Cidni, di Taman Menteng, kemarin.

Para PMKS itu dapat dengan mudah ditemui di sejumlah lokasi seperti Jalan Sabang, Jl Kebon Sirih, kawasan Senen, samping RS PGI Cikini, RSCM dan kawasan Monas. "Keberadaan PMKS, khususnya pengemis maupun pengamen yang membawa anak-anak sangat mengganggu. Harusnya instansi terkait bisa meminimalisir atau mengha-

lau para PMKS itu," jelas Fardiansyah, warga Kelurahan Kwi-tang, Senen, kemarin.

Menanggapi itu Kepala Sudein Sosial Jakarta Pusat, Susana Budi Susilowati mengatakan, hingga kini pihaknya masih terus melakukan penjagaan di titik rawan PMKS. "Kami masih melakukan penjagaan di titik rawan, kami juga lakukan patroli untuk menjangkau PMKS untuk selanjutnya kita rujuk ke panti," tandasnya. (nas)

Intruksi / Informasi	Diteruskan / Kepada



**GUNTINGAN BERITA**  
**PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**  
**SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN**

Hari : **Rabu**      Tanggal : **27**      Bulan : **MEI**      Tahun : **2015**

<b>MEDIA</b> :	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

**Halaman** : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,  
 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,      **Kolom** : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

**Tak Dapat Kios di Lenggang Jakarta**  
**Ratusan Pedagang Protes**

**GAMBIR (Pos Kota)** - Ratusan pedagang Kaki-5 dan petugas kebersihan di Monas berunjuk rasa di depan Balaikota Pemprov DKI Jakarta, Selasa (26/5). Mereka protes, lantaran banyak pedagang tidak mendapat kios di Lenggang Jakarta.

"Kami kecewa atas keputusan Pemprov DKI Jakarta yang semena-mena. Jangan singkirkan kami, Kaki-5 bukan koruptor BLBI dan juga maling," teriak seorang orator.

Tak hanya itu, massa juga meminta Kepala Unit Pengelola (UP) Monas,

Rini Hariani dipecat karena tiduding tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. "Copot Ibu Rini, karena sampai saat ini petugas kebersihan belum juga dibayar gajinya," ucapnya.

Sementara itu, meski aksi demonstran berlangsung tertib dan lancar namun mereka mendapat pengawalan ketat dari polisi, sehingga arus lalu lintas di sekitar Balaikota tidak terganggu. Massa membubarkan diri setelah perwakilan dari pedagang ditemui pejabat Kesbangpol. (deny/st)

Intruksi / Informasi	Diteruskan / Kepada



**GUNTINGAN BERITA**  
**PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**  
**SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN**

Hari : **Rabu**      Tanggal : **27**      Bulan : **MEI**      Tahun : **2015**

<b>MEDIA :</b>	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

**Halaman :** 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,      **Kolom :** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  
 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,

## Ribuan PKL 'Terbuang' dari Lenggang Jakarta

KANTIN Lenggang Jakarta di kawasan Monas menual persoalan baru. Sejumlah pihak menilai, keberadaan tempat berjualan yang telah direstikan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) itu tak bisa mengakomodir seluruh Pedagang Kaki Lima (PKL):

Dari 1.871 PKL di Monas, hanya 329 orang yang masuk Lenggang Jakarta. Sementara 1.971 sisanya diabaikan tanpa solusi. Akibatnya, ribuan PKL yang kecewa berdemo ke kantor Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Merdeka Selatan. Dalam aksi tersebut, mereka mengeluhkan program tersebut.

Koordinator pedagang yang juga Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Ali Maksud mengatakan, kebijakan Gubernur Ahok mengadakan Lenggang Jakarta di Monas menjadi sumber masalah bagi ribuan PKL. Pasalnya dalam program tersebut tidak semua PKL diakomodir dalam untuk

mendapatkan kios yang prakarsai Rekso Group.

"Ada pengusaha raksasa yang terlibat, menguasai Monas, yakni yang diakomodir 329 orang di Lenggang Jakarta. Lalu yang 1.971 mau diapakan?" kata Maksud di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, kemarin (26/5).

Selain itu, APKLI juga mempersalahkan masuknya perusahaan-perusahaan besar di kawasan Monas yang mulai mendominasi lahan di Monas. Bukan hanya itu mereka juga mempersalahkan sikap Kepala Unit Pengelola (UP) Monas Rini yang meminta PKL untuk melewati pagar masuk ke dalam Monas.

"Adanya perusahaan retail (menyebutkan merk) juga mengganggu PKL. Rini dan Bapak Wahono meminta kita jangan lewat pintu. Lewat pagar saja. Di dalam juga dijaga, mereka harus bentrok fisik dulu. Kita minta diakui dan ditata,

kita juga akan menjaga ikon monas," tandas dia. Dalam aksi tersebut, APKLI juga mengadakan nasib ke DPRD DKI Jakarta.

Terkait dengan persoalan itu, Gubernur Ahok menegaskan, Kantin Lenggang Jakarta agar membuat kawasan Monas menjadi tertib. Selama ini, kawasan Monas tidak teratur. Selain itu, untuk menjamin kesehatan bahan makanan yang dijual serta bebas dari zat kimia.

"Di Lenggang Jakarta saya jamin nggak ada pakai zat kimia, warna atau apapun. Turis pasti aman. Tidak ada beras plastik atau telur plastik," tegas dia.

Ia menilai, selama ini dari hasil uji lab BPOM masih banyak makanan yang diujakan para pedagang mengandung zat kimia berbahaya.

"Kami minta BPOM periksa makanan. Hampir setiap sampel PKL tidak memenuhi syarat. Cara menyandian kualifikasi kasih cat, formalin dan lain-lain. (Ini) Menyebabkan tingkat kena kanker di Jakarta tinggi," tutur dia.

Di Lenggang Jakarta, Ahok sengaja memasang tarif harga yang lebih mahal untuk setiap produk makanan, minuman dan aksesoris yang dijual. Hal ini bertujuan agar mereka bisa belajar berkoperasi. Seperti diketahui, harga produk-produk yang diujakan di Lenggang Jakarta berkisar antara Rp 15-40 ribu. "Jajannya jadi lebih mahal dibandingkan dulu. Ini buat naik kelas harga di sini di bawah mall, tapi di atas PKL," kata Ahok. (wok)



ASPIRASI: PKL Monas gelar aksi unjuk rasa di kantor gubernur DKI Jakarta.

Intruksi / Informasi	Diteruskan / Kepada
----------------------	---------------------



**GÜNTINGAN BERITA**  
**PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**  
**SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN**

Hari : **Rabu**      Tanggal : **27**      Bulan : **MEI**      Tahun : **2015**

<b>MEDIA</b>	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	
<b>Halaman</b>	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,			<b>Kolom</b> : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,			

# PUNGLI, LIMA JUKIR DIPECAT

**JAKARTA (Pos Kota)** – Lima juru parkir (jukir) meter di Jalan Sabang, Jakarta Pusat, dipecat. Setelah terbukti bermain mata dan memungli pemilik kendaraan bermotor saat parkir di lokasi jukir tersebut bertugas.

Peliput: Guruh

“Di Jalan Sabang sudah lima orang jukir kita pecat, karena kecenderungan pungli saat malam,” tegas Sunardi Sinaga, Kepala Unit Pengelola Teknis (UPT) Persiapan DKI Jakarta, Selasa (26/5).

Sebelum menjatuhkan sanksi pemecatan, Sunardi mengaku telah mengumpulkan catatan dan penilaian terhadap jukir yang tak punya integritas dalam menjalankan tugas. Evaluasi kinerja jukir meter tersebut dilakukan setiap tiga bulan. “Kami sudah masehati dan punya data,” sambungnya.

Sunardi mengatakan, saat ini pihaknya juga tengah menilai jukir meter di Kelapa Gading, Jakar-

## Setiap Tiga Bulan Dievaluasi

ta Utara. Jukir di lokasi yang berperilaku menyimpang saat menjalankan tugas seperti menerima pungli dari para pemilik kendaraan bermotor telah terdata dan terancam dipecat. “Kita sudah punya catatan si A, si B, si Z yang suka terima duit dari main mata dengan pemilik kendaraan bermotor,” ujarnya.

### KONSEP BARU

ia menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan



menerapkan sistem pengelolaan parkir dengan konsep baru di parkir meter. Di mana, jukir akan dibekali alat untuk mencan nomor polisi kendaraan bermotor. “Nanti akan diketahui ken-

daraan itu sudah lewat waktunya, dan sudah bayar parkir atau belum,” bebernya.

Pemilik kendaraan yang kedapatan melanggar akan dikenakan denda parkir progresif, hingga 10 kali lipat.

Namun, sebelum itu pihaknya akan meminta Surat Keputusan atau Peraturan Gubernur untuk menerapkan denda parkir progresif tersebut. (st)

Intruksi / Informasi	Diteruskan / Kepada



**GUNTINGAN BERITA**  
**PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**  
**SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN**

Hari : **Rabu**      Tanggal : **27**      Bulan : **MEI**      Tahun : **2015**

<b>MEDIA</b>	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

**Halaman** : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,  
 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,      **Kolom** : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

**JALAN SABANG**

## Lakukan Pungli, 5 Juru Parkir Dipecat

JAKARTA (Suara Karya): Unit Pengelola Telnis (UPT) Perpakiran Dinas Perhubungan (Dishub) DKI memecat lima juru parkir (jukir) parkir meter di Jalan Sabang, Menteng, Jakarta Pusat. Kelima jukir tersebut dipecat lantaran selama ini kerap bermain mata dan kedapatan mengambil pungutan liar (pungli) dari pemilik kendaraan di lokasi parkir meter.

"Di Jalan Sabang sudah lima jukir kita pecat karena kecenderungan pungli saat malam," kata Sunardi Sinaga, Kepala UPT Perpakiran DKI, Selasa (26/5).

Dikatakan Sunardi, sebelum menjatuhkan sanksi pemecatan, pihaknya telah mengumpulkan catatan dan penilaian terhadap para jukir yang tak punya integri-

tas dalam menjalankan tugasnya di lapangan.

Evaluasi kinerja para juru parkir meter tersebut dilakukan setiap tiga bulan. "Kita sudah naschati dan punya datanya, makanya mereka kita pecat dan tidak usah dipakai lagi," katanya.

Dikatakan Sunardi, saat ini pihaknya juga tengah melakukan penilaian terhadap jukir parkir meter di Kelapa Gading, Jakarta Utara. "Kita sudah punya catatan si A, si B, si Z yang suka terima duit pungutan," ujarnya.

Ia menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya juga akan menerapkan sistem pengelolaan parkir dengan konsep baru di parkir meter. Di mana, para jukir akan dibekali alat untuk men-scan nomor polisi kendaraan. (dwi)

Intruksi / Informasi	Diteruskan / Kepada



**GUNTINGAN BERITA**  
**PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**  
**SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN**

Hari : **Rabu** Tanggal : **27** Bulan : **MEI** Tahun : **2015**

MEDIA :	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	
Halaman :	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,	Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,		
	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,			

**Pedagang Sebut Djangga Lubis Tak Becus Benahi Pasar Senen**

# Sudah Uzur, Ahok Disuruh Ganti Dirut PD Pasar Jaya

**Para pedagang Pasar Senen Blok VI, Jakarta Pusat berharap agar Gubernur DKI Ahok mencopot jabatan Djangga Lubis sebagai Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Jaya.**

SILAIN usianya sudah uzur, Djangga dinilai pedagang tidak kompeten dalam menangani permasalahan yang dialami pedagang di Blok VI selama ini.

Ketua Perkumpulan Pedagang Pasar Senen Tamban Tambunan, Ronengakun, Gubernur Ahok sudah selangkah lebih maju menggusur Dirut PD Pasar Jaya Djangga Lubis dari kursi empuknya.

"Ini bukan bicara person to person, tapi memang sudah layak diganti. Apalagi kinerjanya sudah kami saksikan, masalah Pasar Senen Blok VI saja tidak bisa diselesaikan. Kami berharap ini menjadi antisipasi pak Ahok," kata Tamban, kepada Nonstop, Selasa (26/5).

Lanjut Tamban, dengan umur 52 tahun, kinerja Djangga



Jaya dinilai sudah semakin lambat dalam merespon permasalahan pasar. Menurutnya, masih banyak orang muda dan emigran yang mau pergi merantau ke Pasar Senen Blok VI tersebut. "Apalagi selama ini Djangga tidak menunjukkan kinerjanya. Dia tak ada memberikan solusi atas kondisi pedagang Blok VI," ungkap Tamban.

Bahkan lanjut Tamban, setelah Djangga menempatkan anak buahnya bernama Royani sebagai manager Pasar Senen Blok VI, justru semakin memperkeruh masalah. "Penempatan Royani tidak menunjukkan kejelasan. Antri berseberangan dengan pedagang selama ini. Royani ditempatkan di Pasar Senen Blok VI selama ini karena romang sebagai tangan kanan Djangga Lubis," ungkap Tamban.

Tamban menperlihatkan, Pemprov DKI Jakarta yang tetap mempertahankan Djangga Lubis sebagai orang nomor satu di PD Pasar Jaya.



Dirut PD Pasar Jaya Djangga Lubis

"Apa tidak ada lagi orang yang kompeten selain Djangga" sindir Tamban.

Dia juga mencurigai terhadap rencana PD Pasar Jaya yang ngotot membangun Pasar Senen Blok VI menggunakan konsep pengembang, kemitmbang dana APBD DKI.

"Bisa jadi jika paksa dana pengembang ada for proyek yang didapat," ucapnya.

Ditamping itu, Tamban juga mengadopsi kata para eksem pemimpinan PD Pasar bermain dan berbisnis kios di Pasar Senen Blok III. Soalnya, kios-kios di Blok III yang per-

nah kebakaran itu, kita lebih banyak ditempati para pedagang baru, bukan pedagang yang menjadi korban kebakaran. "Bayangkan penempatan Blok III bukan pedagang korban kebakaran, sebaliknya diisi pedagang baru, Blok III sepertinya diperjual belikan," ujarnya.

Secara terpisah, pengarah perkotaan Arif Hamzah menilai, sesuai ketentuan undang-undang, untuk membangun Pasar Senen Blok VI tidak bisa dibebankan kepada APBD.

"Tapi karena PD Pasar Jaya salah satu pemegang saham di Bank DKI tidak dapat memanfaatkan, dengan meminjam kepada Bank DKI, tanpa harus memisahkan ke pihak swasta," ungkap Amir.

Sryangnya kata Amir pihak PD Pasar Jaya tidak memanfaatkan keberadaan Bank DKI untuk modal merevitalisasi Pasar Senen Blok VI tersebut. "Saya khawatir ada segelintir yang belum deal yang dilakukan Dirut PD Pasar Jaya kepada pihak swasta hingga sampai saat ini tidak terbangunnya Pasar Senen Blok VI," ungkap Amir.

Dia mengemukakan, tidak

diribungunya Pasar Senen Blok VI selama ini, karena komunikasi dan koordinasi tidak dilakukan oleh Djangga selaku Dirut PD Pasar Jaya. "Kalau teori manajemen, Djangga memang tidak becus dan layak direvisi. Dan ini tergantung DPRD dan Gubernur yang mencopot," tuturnya.

Sementara Anggota DPRD Komisi B Mike Yuke mengkritik Dirut PD Pasar Jaya Djangga Lubis kinerjanya memang belum maksimal selama ini.

"Tapi memang kalau melihat kinerja PD Pasar Jaya harus dilihat kasus per kasus. Apakah memang itu karena pimpinannya, atau bisa saja manager pasar," kata Wakil Ketua Bidang Perencanaan DPD PDIP Perjuangan DKI Jakarta itu.

Dia menyatakan, sampai saat ini Komisi B DPRD menilai terus memonitor dan mengkritik kinerja PD Pasar Jaya. Namun kata dia, ada juga beberapa kinerja PD Pasar Jaya yang harus diapresiasi.

"Sampai saat ini kami belum tahap warning kepada kinerja Dirut PD Pasar Jaya, tapi kami selalu melakukan teguran kepada PD Pasar Jaya," ujar Yuke. (RAMIRRN)

Intruksi / Informasi	Diteruskan / Kepada



**GUNTINGAN BERITA**  
**PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**  
**SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN**

Hari : **Rabu**      Tanggal : **27**      Bulan : **MEI**      Tahun : **2015**

<b>MEDIA</b>	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

**Halaman** : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,  
 2, 4, 6, 8, **10**, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,      **Kolom** : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,



DANI THINDOPOS

**BAKTI: Koramil serbu Pasar Blok G Tanah Abang.**

### **Koramil 05 Beraksi**

**BABINSA** Koramil 05/Tanah Abang Dim 0501/ Jakarta Pusat BS melaksanakan karya bakti dengan membersihkan lingkungan Pasar Blok G Tanah Abang, Jakarta Pusat. Turut berpartisipasi dalam karya bakti kali ini adalah Muspikel Kebon Kacang dan masyarakat Kelurahan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Kegiatan dipimpin oleh Wadanramil 05/ Tanah Abang Kapten Arm M. Nasution. Menurut dia, karya bakti kali ini adalah bentuk kepedulian antara Koramil 05/Tanah Abang, Muspikel Kebon Kacang bersama dengan masyarakat Kelurahan Kebon Kacang terhadap kebersihan lingkungan terutama di Pasar Blok G Tanah Abang. "Semoga dengan lingkungan Pasar Blok G Tanah Abang yang menjadi bersih seperti ini. Nantinya akan dapat membuat pembeli merasa nyaman untuk berbelanja. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para pedagang di Pasar Blok G Tanah Abang," papar dia.

Dalam karya bakti kali ini berhasil diangkut sampah sebanyak 42 karung sampah, baik sampah organik maupun non organik. (dnl)

Intruksi / Informasi	Diteruskan / Kepada





**GUNTINGAN BERITA**  
**PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**  
**SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN**

Hari : **Rabu** Tanggal : **27** Bulan : **MEI** Tahun : **2015**

<b>MEDIA</b> :	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

**Halaman** : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,  
 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, **Kolom** : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

## BPOM DKI Temukan 8 Lokasi PKL Jual Jajanan Mengandung Boraks



TOELDES/SHANTER

**PENKOT** Jakarta Pusat melakukan razia dan memeriksa sampel makanan yang dijual PKL beberapa waktu lalu.

**Jakarta, HanTer** - Peredaran makanan dengan kandungan bahan yang berbahaya mengancam warga Ibukota. Terhitung sejak Januari-Mei 2015, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) DKI mencatat ada delapan lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menjual jajanan mengandung formalin dan boraks.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI, Joko Kundaryo membenarkan hal tersebut. Jajanan mengandung bahan berbahaya ditemukan berdasarkan hasil sidak BPOM DKI bersama dengan pihaknya sejak Januari-Mei 2015.

"Selama kurun waktu itu, sedikitnya ada tujuh hingga delapan lokasi PKL seperti di kawasan Sabang, Jakarta Pusat dan Blok S, Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang menjual makanan mengandung boraks dan formalin," ujarnya dihubungi *Harian Terbit*, Selasa (26/5/2015).

Joko mengungkapkan, dari delapan lokasi PKL tersebut, sedikitnya terdapat empat sampai lima pedagang yang menjual makanan ber-bahan formalin dan boraks. Bahan makanan berbahaya itu umumnya ditemukan di jajanan pedagang bakso, tahu dan kerupuk. "Kebanyakan itu

pedagang tahu, bakso dan kerupuk. Mereka rata-rata mendapatkan bahan makanan tersebut dari luar kota," terangnya.

Ia mengungkapkan, pedagang yang menjual boraks dan formalin sejauh ini hanya diberikan sanksi sosial berupa penempelan stiker berisi tulisan jika kios dagangan mereka menjual bahan makanan berbahaya.

"Sanksi sosial ini cukup efektif membuat jera pedagang. Karena setelah kita lakukan sidak kembali, sudah tidak ada lagi pedagang yang menjual jajanan berformalin dan mengandung boraks," ujarnya.

■ Sammy

Intruksi / Informasi	Diteruskan / Kepada



# GUNTINGAN BERITA

## PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

### SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Hari : **Rabu** Tanggal : **27** Bulan : **MEI** Tahun : **2015**

MEDIA :	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, **25**, 27, 29, 31, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,



ANTISIPASI: BPCN menguji sampel makanan dari lokbin Jalan Kebon Sirih dan Irian kebarat.

## Duh, Zat Berbahaya di Lokasi Binaan

**MENTENG** - Badan Pengawasan Obat dan Makanan DKI kembali menorekan zakatima tertutupan pada rakaman di dua lokbin binaan (lokbin) perprov. Yakni, Lokbin Jalan Kebon Sirih Baran dan Jalan Irian, Menteng. Ada 45 sampel makanan yang diambil dan diuji.

Hasilnya, terdapat makanan yang dianggap bahan kimia berbahaya seperti formalin dan pengawet kayu. Temuan itu terdapat pada tahu, mi kuning, dan tahu isi dari Lokbin Jalan Kebon Sirih Baran.

Sampel yang diambil dari Lokbin Jalan Irian masih diuji.

Menurut Sukadi, seorang pedagang di Lokbin Jalan Irian, petugas mengambil sampel ikan prereng, cumi-cumi, dan usus. Ususnya, makanan yang dijual itu dibelikan Pasar Gagrak, Korpri Paksi, Senen. "Pedagang lain nggak tahu yang berformalin atau tidak. Kami bel sudah begitu bentuknya," ujar pemilik warung makan tersebut.

Dia mengatakan tidak akan membeli di pasar itu bila hasil uji memang positif mengandung bahan kimia berbahaya. Pedagang warungnya pun kebanyakan karyawan perumahan dan hotel di sekitar area tersebut.

Sementara itu, Kasudin UMRM Jakarta Pusat Ety Sparta menjelaskan, pengujian kandungan kimia itu dilakukan berdasar insentif dan kerja sama dengan BPCN DKI. Ia tidak sebetulnya makanan yang tercemar tidak dijual. Hal itu langsung dilawa pengaji. Menurut dia, masyarakat pedagang menjual karibon tidak produsen lokal.

Karena itu, Ety mengimbau

pedagang berbelanja di pasar sehat percontohan di Jakarta Pusat. Yakni, Pasar Johar Baru. Di pasar itu, makanan yang dijual sudah steril dari bahan kimia berbahaya. "Pedagang sebaiknya pindah ke pasar itu," ujarnya.

Dia menerangkan, pihaknya akan terus menyidik pasar. Taggornya adalah, sepuluh lokbin bebas makanan yang mengandung zat kimia seperti formalin, borax, dan pestisida. Di Jakarta Pusat, ada 42 lokbin. Sejauh ini, empat lokbin telah diok. Yakni, Lokbin Kampung Lima, Jalan Sunda Kelapa, Kebon Jalan Irian, dan Sirih Baran.

Sementara itu, korwas (26/5) Pemkot Jakarta Timur mengandeng BPCN DKI Jakarta untuk mempositifkan rakamnya kepada kepala SD terkait dengan peredaran makanan dan minuman berbahaya. Menurut Askesnas Kota Administrasi Jakarta Timur Irena Hajan, sosialisasi kepada para kepala sekolah dengan temuan beracun sementara jajan-jajan sehat bila dikemas di anak-anak.

"Kepala sekolah dan guru harus benar-benar memantau. Jangan sampai anak didik mengonsumsi jajanan yang mengandung pengawet," katanya di hadapan ratusan kepala sekolah dan guru di blok C, gedung kantor wali kota Jakarta Timur.

Pitakrya pun berharap tidak diproses lagi jajan-jajan karibon. Hal ini karena berbahaya. "Mudah-mudahan tidak ada lagi

apalagi bahan tersebut berpotensi mengandung karibon," jelasnya.

**Gagas Pasar Sehat Pangan**  
Kabar peredaran beras sintesis atau beras plastik ikut meyakinkan sejumlah instansi Pemprov DKI bergerak. Dalam upaya tersebut, tim Dirjen Keprocot Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKM) serta Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan (KPKP) DKI aktif menerjalkan petugas ke sejumlah lokasi. Hasilnya, wilayah itu kota aman dari peredaran beras berbahaya itu.

Kepala Suku Dinas (Sudin) KPKP Jakarta Selatan Sri Hartati menjelaskan, sejak dinas KPKP menyidik Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, instansinya juga bergerak. Banyak petugas yang turun ke pasar di wilayah Jakarta Selatan. Dari setiap pasar, petugas mengambil sampel untuk diperiksa tim ahli di laboratorium milik dinas KPKP.

Selain itu, petugas mengirimkan sampel beras yang diambil kepada Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) DKI untuk dibelit kode keasliannya. Hingga kemarin (26/5), sekitar 192 sampel beras dikincikan ke laboratorium Dinas KPKP Pusat-pusat BPOM DKI. Berdasar hasil pemeriksaan, sebanyak sembilan sampel tersebut negatif bahan plastik. "Tinggus saat ini, kami belum menemukan beras plastik," katanya.

Meski demikian, Sri tetap mengintensifkan sidak beras di wilayah mereka. Kemarin dia bersama Wali Kota Jakarta Selatan Syaifulrahman Noer menyidik Pasar Kebayoran Lama, Meskipun tidak termasuk pasar pusat beras, pasar itu adalah salah satu pasar yang menjual dan menjual Jakarta Selatan untuk beberapa jabatan dan pokok.

Dalam kesempatan tersebut, pitakrya berburu para pedagang yang memarkan beras plastik sebagai sampel kepada petugas. Dengan demikian, petugas segera bertindak.

"Kalau terbelit ada yang aneh, langsung lapor ke saya," pitakrya.

Di wilayah Jakarta Pusat, korwas Sudin KPKP juga menyidik Pasar Kemayoran dan Pasar Gendong, Baru Compaka Putih. Hasilnya, tim tidak mendapati beras plastik di dua pasar itu. "Kami bawa mobil uji laboratorium saat sidak. Hasilnya memang nggak ada," kata Kasudin KPKP Jakarta Pusat Mohammad Mulyadi.

Dia menambahkan, pitakrya sedang menggagas pasar sehat pangan. Ada lima pasar yang tahun ini ditargetkan. Dengan konsep itu, lima pasar tersebut nanti benar-benar bebas dari bahan-bahan

berbahaya. Kemasannya adalah Pas Kemayoran, Gendong Cérpa Putih, Senen, Bendil, dan Paksi. Menurut Mulyadi, indikasi keberadaannya, antara lain beberapa komoditas seperti daging ikan, udang, dan itu olahan tidak berformalin. Di mengungkapkan, beberapa pangan itu seharusnya tidak diawetkan dengan es. "Kami ingin menjaga konsumen benar-benar mendapatkan makanan sehat dan layak," ungkapnya.

Selain itu, Sudin KPKP Jakarta Timur turun ke pasar-pasar Tujuannya, mengantisipasi peredaran beras plastik. Dari sampel yang dikirim ke Pas Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian Provinsi DKI Jakarta hasilnya juga negatif. Contoh tersebut diambil dari Pas Cakung, Ujung Merang, Betega Perumahan Kerdik, dan Cibubur.

Sementara itu, Kasiditansi dan Kebencanaan (Kasi Taluh) hani Indriyanto menjelaskan untuk mendapatkan hasil, pihaknya akan memang memusatkan waktu dua hingga tiga hari. "Makannya, hasilnya baik keluar hari ini (kemarin)," ungkapnya. (bad/rya/sya/co2/ha)

Intruksi / Informasi	Diteruskan / Kepada



**GUNTINGAN BERITA**  
**PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**  
**SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN**

Hari : **Rabu**      Tanggal : **27**      Bulan : **MEI**      Tahun : **2015**

<b>MEDIA</b>	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

**Halaman** : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,  
 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,      **Kolom** : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

**LINTAS BERITA**

**Taman masih Kotor, Ahok Tegur Kepala Dinas**

GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kembali melayangkan teguran kepada salah satu satuan kerja perangkat daerah (SKPD), yakni Dinas Pertamanan dan Pemakaman (Distamkam) DKI Jakarta. Kemarin, Ahok mengajak dinas terkait mengunjungi dua taman di Jakarta Pusat. Ahok menjumpai taman tersebut kotor dengan sampah puntung rokok, sedotan, dan kemasan air minum yang berserakan.

"Orang taman kita ini lucu, ada botol kemasan air minum, sedotan, puntung rokok dibiarkan. Itu namanya bukan *ngurus* taman. *Ngurus* taman kan bukan cuma bikin pohonnya tumbuh, tapi harus bersih juga," ujar Ahok se usai kunjungannya, di Balai Kota DKI, kemarin.

Ahok menyangkal jika dia disebut mengada-ngada karena saat berkunjung ke taman di Jalan Hayam Wuruk dan di Jalan Mangga Besar, Jakarta Pusat, ia menemukan sampah tersebut berserakan. Ia berharap ke depannya para lurah dan camat bisa turut serta mengawasi taman-taman di wilayah masing-masing. (Put/J-3)

Intruksi / Informasi	Diteruskan / Kepada



**GUNTINGAN BERITA**  
**PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**  
**SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN**

Hari : **Rabu**      Tanggal : **27**      Bulan : **MEI**      Tahun : **2015**

<b>MEDIA</b>	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

**Halaman** : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,  
 2, 4, **6**, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,      **Kolom** : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

## Pengadaan HT dan Rig Radio Diduga Sarat Kolusi

**Jakarta, HanTer** - Pemprov DKI kembali diguncang masalah. Kali ini, terkait pengadaan Handy Talkie (HT) Trunking dengan anggaran mencapai Rp17,5 miliar serta Rig Radio Trunking dengan pagu anggaran sebesar Rp12,995 miliar. Bila di total, kedua proyek itu memakan biaya sekira Rp30 miliar.

Berdasarkan data yang dihimpun, anggaran tersebut merupakan hasil dari Pokok Pikirian (Pokir) Anggota DPRD DKI Komisi A yang tertuang dalam APBD Perubahan tahun 2014. Dua proyek tersebut, berada di bawah Dinas Komunikasi

dan Informasi Pemprov DKI Jakarta.

Dari hasil lelang yang diadakan, yang menjadi pemenang lelang pengadaan Rig Radio-Trunking adalah PT Inticom Sentralindo dengan penawaran sebesar Rp12,344 miliar, dan PT Prima Reka Teknologi selaku pemenang tender pengadaan HT Trunking dengan penawaran sekira Rp15,7 miliar.

"Kami memang menang tender. Kami dinyatakan memenuhi syarat semua. Tapi enggak tahu kenapa ada salah satu perusahaan yang menyanggah terus kami enggak jadi dapat

proyek tersebut," ujar seorang sumber dari salah satu perusahaan pemenang tender, saat dikonfirmasi Senin (25/5/2015).

Sumber tersebut mengatakan, menurut informasi yang diperolehnya, proyek pengadaan lebih dari seribu unit HT Trunking beserta Rig Radio Trunking itu, berujung pada pembatalan lelang dan penunjukan langsung (PL) pada salah satu perusahaan yang dinyatakan kalah dalam lelang.

"Saya dengar lelangnya dibatalkan, terus PL. Tapi, kan aneh, proyek lebih dari Rp200 juta kok bisa PL.

Karena setahu saya, PL itu bisa dilakukan kalau proyeknya dibawah Rp200 juta," keluhnya.

Dikatakannya, pihaknya mempertanyakan kasus tersebut pada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. "Tapi cuma lewat SMS saja, bukan surat resmi," pungkasnya.

Informasi yang dihimpun, pengadaan kedua proyek puluhan miliar itu dijalankan oleh PT Niaga Buana Indonesia. Padahal, harga yang mereka tawarkan lebih tinggi sekira Rp2 miliar dari perusahaan pemenang tender.

■ Sammy

Intruksi / Informasi	Diteruskan / Kepada



# GUNTINGAN BERITA

## PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

### SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Hari : **Rabu**      Tanggal : **27**      Bulan : **MEI**      Tahun : **2015**

<b>MEDIA</b>	1. Indo Pos 2. Jawa Pos 3. Kompas 4. Koran Sindo 5. Koran Tempo	6. Lampu Hijau 7. Media Indonesia 8. NonStop 9. Pos Kota 10. Pelita	11. Rakyat Merdeka 12. Republika 13. Suara Karya 14. Sentana 15. Warta Kota	16. Harian Terbit 17. Sinar Harapan 18.
<b>Halaman</b>	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,			<b>Kolom</b> : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

## Pengajuan Lelang Masih Minim Kerja Pejabat DKI Lelet

JAKARTA (Pos Kota) – Gubernur Ahok menilai kinerja bawahannya masih lelet dalam menjalankan berbagai program kerjanya. Salah satu indikasinya adalah masih minimnya pengajuan lelang melalui Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD).

Seharusnya SKPD telah mengajukan berkas lelang sejak Januari. Sehingga saat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2015 disahkan, lelang bisa langsung dijalankan, tanpa perlu menunggu pengajuan lagi. "Kinerja mereka (red-SKPD) masih lambat," tegas Ahok di Balai kota, Selasa (26/5).

Pernyataan Ahok diamini Wakil Gubernur (Wagub) Djarot Saiful Hidayat. Padahal, dirinya telah mengingatkan kepada jajaran SKPD saat Januari dan Februari agar menyiapkan berkas lelang. SKPD diminta untuk tidak memikirkan APBD, apakah dalam bentuk peraturan daerah (Perda) atau peraturan gubernur (Pergub).

"Awal tahun saya keliling ke seluruh SKPD sampai ke walikota, mengingatkan untuk menyiapkan

dokumen lelang. Tidak usah mikir Perda atau Pergub, siapkan saja dokumen lelang, ternyata belum juga," ucapnya.

### PERCEPAT KERJA

Ia meminta kepada jajaran SKPD untuk mempercepat kinerja saat ini. Agar program yang telah disusun bisa segera dijalankan. Pasalnya APBD 2015 yang ditetapkan sebesar Rp69,28 triliun telah tersedia dan siap digunakan.

Lambatnya salah satu SKPD, kata Djarot, bisa berpengaruh terhadap yang lainnya. Sehingga semua SKPD diminta untuk saling bersinergi. Jajaran SKPD diminta untuk tidak takut dalam mengambil inisiatif, asal tidak korupsi dan melanggar aturan yang ada.

"Ada beberapa SKPD ketakutan mengambil inisiatif, ketakutan ambil risiko. Kalau kau bekerja sesuai dengan prosedur, ketentuan, hatimu bersih, tidak ada mark up, tidak ada rekayasa, nggak usah takut. Apa lagi takut di mutasi, rotasi, diturunkan jabatannya, nggak usah takut, kerja saja yang bagus sesuai dengan tugas," ucap Djarot. (guruh/st)

Intruksi / Informasi	Diteruskan / Kepada



**GUNTINGAN BERITA**  
**PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**  
**SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN**

Hari : **Rabu**      Tanggal : **27**      Bulan : **MEI**      Tahun : **2015**

<b>MEDIA</b>	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

**Halaman** : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,      **Kolom** : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

## Kisruh Kepengurusan Apartemen Dinas Perumahan Didesak Turun Tangan

JAKARTA (Pos Kota) - Penghuni dan Pengurus Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) Apartemen The Boulevard di Jalan Fachrudin, Tanah Abang mendesak Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta segera turun tangan. Menyusul potensi konflik perpecahan di kepengurusan yang akan berdampak pada penghuni.

Menurut Ketua PPRS Bidang Pengawas Pengelola Gedung dan Apartemen The Boulevard, Krisnanto Pradono, permasalahan di huniannya terjadi sekitar pertengahan April. Dimana, salah satu pengurus menjadi inisiator membentuk PPRS tandingan. Padahal Rapat Umum Tahunan Anggota (RUTA), sesuai dengan Anggaran Dasar Aturan Rumah Tangga (AD/ART) akan berlangsung pada September mendatang.

"Melihat rentang waktu yang hanya beberapa bulan lagi. Saya juga bingung apa motif yang bersangkutan membentuk kepengurusan tandingan," ujar Krisnanto, Selasa (26/5). "Sesuai dengan AD/ART yang berlaku, kepengurusan PPRS tandingan tersebut cacat hukum."

Hal ini berdasarkan dari syarat dan mekanisme pembentukan PPRS tersebut. Di antaranya ketidakabsahan pemilih yang disurat kuasakan. Kedua dari Nilai Perbandingan Proporsional (NPP). Sesuai dengan aturan yang berlaku di The Boulevard minimal kepengurusan PPRS di setuju sekitar 25 persen dari total penghuni.

Belum hal lainnya, yakni ketiadaan penge-sahaan dari instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DKI Jakarta. "Ini beberapa kejang-galan dari pembentukan PPRS tandingan itu," tukasnya seraya berharap Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DKI Jakarta segera turun tangan.

Sebelumnya, seperti diberitakan Pos Kota, Selasa (26/5), kalangan DPRD pe-simis membenahan terhadap administrasi kependudukan di rumah susun atau apartemen yang tengah dilakukan DKI berjalan tidak maksimal, karena masih banyaknya kisruh internal di hunian tersebut yang hingga kini belum juga terselesaikan. (guruh/st)

Intruksi / Informasi	Diteruskan / Kepada



**GUNTINGAN BERITA**  
**PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**  
**SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN**

Hari : **Rabu**      Tanggal : **27**      Bulan : **MEI**      Tahun : **2015**

<b>MEDIA</b>	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

**Halaman** : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,  
 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,      **Kolom** : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

## Jelang Jakarta Fair Kemayoran Ribuan Stand Dibangun

**KEMAYORAN (Pos Kota)** - Hajatan Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2015 sudah diambang pintu. Saat ini, di arena JIExpo, tempat penyelenggaraan pameran terbesar se-Asia Tenggara sedang sibuk melakukan persiapan antara lain membangun ribuan stand dan seleksi perekrutan pekerja musiman.

"Penyelenggaraan JFK 2015 akan dimulai pada hari Jumat tanggal 29 Mei dan berakhir sampai 5 Juli," ujar Direktur Pemasaran PT JIExpo, Ralph Scheunemann di arena JIExpo Kemayoran, Selasa (26/5).

Kegiatan ini diikuti sekitar 2.700 perusahaan yang terdiri dari 1.500 stand pameran. "JFK menampilkan

pameran multiproduk yang diikuti mulai dari pedagang kecil sampai industri besar," tambahnya.

Kebutuhan ruang pameran dari tahun ke tahun selalu meningkat, sehingga PT JIExpo berusaha memperluas ruangan dengan membangun gedung baru. Saat ini JIExpo sedang dalam tahap menyelesaikan pembangunan hall B3 dan C3 seluas 10 ribu meter persegi. Gedung baru yang terletak di dekat perparkiran ini bisa menampung ratusan peserta pameran. Selain itu JIExpo juga memperluas area parkir yang kini dapat menampung lebih dari 10 ribu unit mobil dan 20 ribu sepeda motor.

### KERJA LEMBUR

Aktivitas di dalam arena JIExpo pada beberapa hari terakhir makin meningkat dengan banyaknya pekerja kasar menyelesaikan stand pameran yang harus selesai paling lambat Kamis. "Kami kerja lembur siang malam untuk menyelesaikan booth otomotif yang harus kelihatan mewah dan rapi," ujar Sudarji, seorang arsitek desain interior.

Sedangkan di gedung utama tampak ratusan anak muda sedang mengikuti seleksi perekrutan pekerja musiman. "Saya sedang tes, melamar sebagai satpam, mudah-mudahan diterima. Upahnya Rp 125 ribu/hari," ujar Irawan. (joko/st)

Intruksi / Informasi	Diteruskan / Kepada



**GUNTINGAN BERITA**  
**PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**  
**SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN**

Hari : **Rabu**      Tanggal : **27**      Bulan : **MEI**      Tahun : **2015**

<b>MEDIA</b>	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

**Halaman** : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,  
 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,      **Kolom** : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

**Aspirasi  
Warga Jakarta**

**Kirim SMS Bisa Berikut Foto  
Ke 0813 8505 1009**

atau telepon langsung redaksi (021) 638 51729  
 foto kirim ke e-mail: poskotawarga@gmail.com

**Terimakasih Petugas Pemadam Kebakaran**

○ Kpd. Yth. Komandan Kebakaran dan anak buahnya.  
 Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya  
 atas jasa bapak-bapak yang telah berhasil memadamkan  
 kebakaran kemarin sore di belakang Bharata Senen.  
 (08161863xxx)

**Tertibkan Pemalak di Monas**

○ Kepada Yth. Bapak Gubernur DKI Jakarta dan bapak  
 Kapolri untuk menerjunkan anak buahnya di Kawasan  
 Monas untuk menertibkan para pemalak di area Mo-  
 nas, karena kami sebagai pengunjung merasa kurang  
 nyaman dengan hal tersebut. Terima kasih.  
 (082299145xxx)

Intruksi / Informasi	Diteruskan / Kepada





**GUNTINGAN BERITA**  
**PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**  
**SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN**

Hari : Rabu Tanggal : 27 Bulan : MEI Tahun : 2015

<b>MEDIA</b>	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

**Halaman** : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,  
 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, **Kolom** : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,



**PANJAT PAGAR MONAS:** Sejumlah pedagang memanjat pagar Monas untuk memasukkan sepeda dan motor mini yang akan disewakan di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat, kemarin. Mereka kucing-kucingan dengan petugas Satpol PP yang berjaga di sana untuk memasukkan barang sewaan dan dagangan dengan segala cara.

Instruksi / Informasi	Diteruskan / Kepada



**GUNTINGAN BERITA**  
**PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**  
**SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN**

Hari : **Rabu**      Tanggal : **27**      Bulan : **MEI**      Tahun : **2015**

<b>MEDIA</b> :	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

**Halaman** : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,  
 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, **20**, 22, 24, 26, 28, 30,      **Kolom** : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,



M/ANGGA YUNEAR

**DIKUMPULKAN DI IRTI:** Petugas menggembok mobil yang terkena razia parkir liar oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta di Lapangan IRTI, Monas, kemarin. Mobil yang terkena razia dikumpulkan di halaman parkir IRTI agar masyarakat yang sudah membayar denda mudah mengambilnya.

Intruksi / Informasi	Diteruskan / Kepada